

BAB III
PROSES TERBENTUKNYA BIJEENKOMST VOOR FEDERAL
OVERLEG (BFO) DALAM PEMBENTUKAN REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT (RIS) TAHUN 1948 - 1949

3.1 Pembentukan Bijeenkomst Federal Overleg (BFO)

Hasil Perundingan Linggajati dan Perundingan Renville mengakui hasil asas mengenai pendirian Federalisme sebagai tatanan baru di Hindia Belanda untuk mewujudkan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat. Van mook berencana untuk membuat Negara Federal di Indonesia. Rencana tersebut mengharuskan untuk mengubah ketatanegaraan Hindia Belanda di Indonesia. Pemerintahan yang ia buat itu disebut sebagai Pemerintahan Federal Sementara seperti yang telah disepakati dalam perjanjian Renville (pasal 1) yang berbunyi.

“ Kedaulatan di seluruh Hindia Belanda ada dan tetap berada ditangan Kerajaan Belanda sehingga setelah suatu tenggang waktu Kerajaan menyerahkan kedaulatannya kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum berakhirnya tenggang waktu itu Kerajaan Belanda berkenan menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab tertentu kepada suatu pemerintahan federal sementara dari wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Serikat itu. Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk itu merupakan suatu negara yang berdaulat dan merdeka yang bermitra dengan Kerajaan Belanda-Indonesia (Uni) yang dikepalai Raja Belanda. Status Republik Indonesia adalah sebagai suatu negara dalam Negara Indonesia Serikat”³⁵

Aksi tersebut dilakukan dengan rencana membentuk negara Federal dengan menyebarluaskan Federalisme di Indonesia pada Konferensi *Houge Veluwe*. Namun Konferensi tersebut gagal memperjuangkan konsep Federal di Indonesia sebab bertentangan dengan keinginan Belanda yang menginginkan wilayah Republik juga masuk kedalam persemaikmuran dibawah Belanda.

³⁵ Ide Anak Agung, *Renville* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983). hlm 69.

Van mook melanjutkan rencananya dengan mengadakan Konferensi kembali di Malino pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa para peserta Konferensi menyetujui perubahan ketatanegaraan menjadi Federasi. Setelah Konferensi di Malino selesai, Van Mook kembali mengadakan konferensi di Denpasar dan menjadi langkah awal untuk membentuk Negara Federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai negara yang pertama kali didirikan. Lalu disusul dengan negara-negara dan daerah otonomi lainnya di Indonesia.³⁶

Bulan Mei 1948, van Mook mengundang para pemimpin dan wakil dari negara-negara bagian untuk berapat di Bandung. van Mook dan stafnya mengusulkan sebuah konsep yang telah dirancang terlebih dahulu mengenai Pembentukan Pemerintahan Sementara VFR (*Voorlopige Federale Regering*). Van Mook yakin konsep itu akan diterima sebab para peserta rapat bahkan tidak diberi ruang untuk mengajukan perubahan-perubahan. Oleh sebab rapat tersebut diarahakan untuk menyetujui konsep itu. Van Mook meyakini juga bahwa kabinet yang ada di Den Haag akan memberikan pengesahan itu, sehingga ketentuan dalam pasal 1 terpenuhi dari enam pasal tambahan itu.³⁷

Pemerintah Federal yang dibuat oleh van Mook pada dasarnya merupakan pemerintahan yang sudah ada dan diisi oleh para orang-orang Belanda atau staf van Mook sendiri. Jadi tidak ada perbedaan antara Pemerintahan Hindia Belanda dengan Pemerintahan Federal. Memang BFO pada waktu itu dibentuk untuk memuluskan niat van Mook untuk menguasai Indonesia lewat kepemimpinanya.

³⁶ Putro Widhi Setyo, 'Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia Dengan Bieenkomst Voor Federaal Overleg', *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3.1 (2018). hlm 38.

³⁷ Agung Ide, *op.cit* .,hlm 179.

Namun van Mook sepertinya tidak memperhitungkan bahwa di kalangan daerah otonom akan melawan. Pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung, Anak Agung mengadakan rapat tandingan, karena pada saat rapat dengan van Mook tidak diberi ruang untuk mengajukan perubahan-perubahan. Atas inisiatif dari Negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Anak Agung dan Negara Pasundan dengan mengajak kembali negara bagian lainnya untuk membuat rapat tandingan didalamnya dan van Mook tidak diikuti sertakan. BFO resmi dibentuk di Bandung dengan nama *Staatkundige Eenheden Conferentie* (konferensi satuan satuan kenegaraan) namun seiring berjalannya waktu lebih dikenal dengan *Bijeenkomst Federale Overleg* (BFO) atau pertemuan musyawarah Federal.³⁸

Konferensi BFO dihadiri oleh para peserta dari negara bagian Federal dan daerah otonom. Tujuan Konferensi BFO ini ialah untuk mencari jalan keluar dari pada situasi politik yang semakin gawat akibat permasalahan antara Republik dan Belanda dan diharapkan pula Konferensi ini dapat mencetuskan rancangan pemerintahan yang lebih baik dari apa yang telah diusulkan oleh van Mook. Apabila Republik bersedia ikut menjadi bagian dari Pemerintahan Federal yang meliputi seluruh Indonesia.

Agenda konferensi pada saat itu diatur oleh Anak Agung dari Negara Indonesia Timur. Namun semua delegasi nampaknya belum semuanya hadir sehingga menunda konferensi itu sampai tanggal 15 Juli 1948. Dibalik penundaan itu Sultan Hamid mencoba mengumpulkan sejumlah peserta yang telah hadir. Pada kesempatan itu Sultan Hamid menuduh bahwa Anak agung sebagai antek Republik. Maka dibuka kembali rapat itu, jalanya rapat pada saat itu sangat alot disebabkan

³⁸ Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 114.

pihak Sultan Hamid dan Anak Agung Berbeda pemahaman. Sehingga kedua kubu tersebut membuat momerendum masing-masing.

Pihak Anak Agung menginginkan pemerintahan Federal sementara yang dipimpin oleh sebuah direktorium yang terdiri dari tiga orang Indonesia dan dipilih oleh para pemimpin negara bagian. Sedangkan pihak Sultan Hamid menginginkan sebuah sistem Federal seperti Negara Amerika Serikat. Pada akhirnya dipilihlah ketua BFO dari Negara Sumatra Timur Mr. T. Bahriun dan wakilnya M. Hanafiah, serta sekretaris dari Hindia Belanda bernama Mr. A.J Vleer, sebagai Sekretaris BFO.³⁹

Setelah dikeluarkannya resolusi BFO yang pertama, tujuan yang dimiliki BFO semakin jelas bahwa pembentukan pemerintahan Federal dan pengakuan kedaulatan seutuhnya bagi Indonesia. BFO meyakini bahwa Republik bersedia melakukan kerjasama dengan BFO dalam pemerintahan Federal apabila pemerintahan tersebut dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tujuan pembentukan BFO ini yang digagas van Mook dengan seiring berjalannya waktu berubah.

Penulis memandang bahwa perubahan yang terjadi ada hubungannya dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh van Mook pada awalnya cukup baik dengan meyakinkan sebagian daerah federal untuk mengikuti gagasannya. Namun, didalam pembentukan negara federal ini ada dua tokoh yang berpengaruh didalamnya yang tidak diperhitungkan seperti Sultan Hamid dan Anak Agung, disebabkan karena Van mook percaya kepada Sultan Hamid. Penulis memandang juga apa yang dilakukan Sultan Hamid

³⁹ Ide Anak. *Op.Cit* ,hlm 38.

terhadap Anak Agung merupakan suatu tindakan pencegahan. Apabila dikaitkan dengan teori yang dikaitkan maka terlihat kedua kubu ini saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama.

3.2 Pengangkatan Sultan Hamid II Sebagai Ketua BFO

Pengangkatan Sultan Hamid menjadi ketua BFO terjadi ketika BFO dihadapkan dengan kondisi sulit atas permintaan pembuatan pemerintahan sementara. Pada saat itu menteri Drees mengeluarkan sebuah undangan untuk seluruh anggota BFO untuk ikut hadir pada pertemuannya di Jakarta. Pada rapat pertama itu dengan BFO, Dress bermaksud ingin menjalani hubungan baik untuk membuat pemerintahan Interim berdasarkan hasil ketentuan (*Bestuursregeling Indonesie in Overgangstijd*) disingkat BIO. Selain itu ia ingin menegaskan bahwa RI sudah tidak ada lagi dalam pemerintahan Interim. Maka dari itu menteri Drees menyarankan agar segera mendekati para pemimpin politik RI untuk diikuti sertakan dalam pembentukan pemerintah Interim, namun sebagai individu bukan sebagai pejabat. Pada kesempatan itu BFO menyarankan agar mengutus sebuah delegasi untuk mendatangi para pemimpin RI itu di Bangka.⁴⁰

Wali Negara Pasundan angkat bicara mengenai ucapan mentrei Dress bahwa RI tidak diikuti sertakan, bahwa ia menyatakan sebaliknya RI itu harus di ikut sertakan dan harus dikembalikan ke Yogyakarta, serta menarik pasukan Belanda dari wilayah RI. Namun pernyataan itu ditentang oleh wali Negara Sumatra Timur bahwa RI sudah tidak ada lagi. Menteri Drees sendiri menyadari bahwa ada beberapa elemen di BFO yang mempunyai pengaruh besar, maka dari itu BFO mencari orang yang mendukung pemerintahan Belanda. Maka di carilah yang

⁴⁰ Putro Widhi Setyo, *op.cit.*, hlm 35.

sekiranya yang dianggap Pro-Belanda, mereka itu antara lain Dr, Supomo dan Darma setiawan diajak berbincang oleh Dress agar mau membantu membuat pemerintahan sementara. Namun jawaban dari dua tokoh tersebut menyatakan bahwa bebaskan dulu pemimpin RI. Tak cukup sampai di situ Dress pun mengajak Sutan Sjahrir untuk ikut, namun jawabanya tetap sama.⁴¹

Untuk melaksanakan pembentukan pemerintahan Interm, Beel sangat mengandalkan Sultan Hamid, ia berharap agar Sultan Hamid bisa mengusahakan agar BFO mendukung pembentukan pemerintah Interm.⁴² Selain itu Beel berharap agar Sultan Hamid bisa merayu pemerintahan Republik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Interm ini. Setelah bertemu dengan Drees, BFO mengadakan rapat dan membicarakan perihal keinginan dua pejabat Belanda. Dalam rapat ini ketua BFO Mr, T. Bahriun tidak hadir, dikarenakan sakit. Kemudian wakil ketua I, hanya membuka rapat dan menyerahkannya kepada Sultan Hamid. Serta dari Negara Indonesia Timur juga tidak mengirimkan utusannya. Sultan Hamid mengambil jalannya rapat, sebagai ketua sidang Sultan Hamid membuka diskusi dengan mengatakan maksud rapat ini adalah membicarakan perihal permintaan menteri Drees agar BFO mendukung pembentukan pemerintahan Interm. Dress ingin agar pertemuan keduanya ia bisa bertemu dengan Anak Agung.

Rapat kali ini Sultan Hamid sebagai ketua rapat sangat hati-hati sebab tidak hadirnya wakil dari Negara Indonesia Timur sebab Sultan Hamid sendiri pun tidak mau mengambil resiko dan lebih baik menutup rapat dengan tidak mengambil keputusan apapun. Pada tahun 1949, Sultan Hamid ditunjuk sebagai ketua BFO

⁴¹ Agung Ide, *op.cit* .,hlm 179.

⁴² Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 174.

menggantikan Pemimpin sebelumnya yang meninggal yakni Mr. Teungku Bahriun dari Negara Sumatra Timur, penunjukan ini beralasan sebab beliau memiliki rekam jejak yang amat baik.⁴³

Rapat kembali dimulai, kali ini mengenai pengesahan resolusi namun karena tidak ada titik temu maka rapat ini pun tidak membawa hasil, maka topik pembicaraan beralih kepada berbagai hal seperti mosi bersama dari wakil Madura, Jawa Tengah dan Sumatra Timur yang sempat berbeda dengan resolusi 13 Januari 1949. Lalu kemudian masalah apakah hasil pembicaraan di Bangka boleh dipublikasikan atau tidak, dan apakah orang-orang yang ditemui boleh diumumkan juga. Sementara diskusi berjalan bertele-tele. Anak Agung mengusulkan sebuah rancangan resolusi mandat yang dulu pernah ditolaknya.

Anak Agung mengajukan sebuah resolusi mandat. Lalu ketua sidang Sultan Hamid mengizinkan untuk membahas kedua konsep yang pertama dari Anak Agung dan konsep kedua dari Sultan Hamid. Maka dibahaslah rancangan mandat itu. Setelah rancangan mandat itu dibahas dengan teliti oleh anggota sidang, maka hasilnya diserahkan kepada sekretaris untuk dirumuskan, adapun rumusan itu berbunyi:

“ untuk menggantikan Mr. Tenungku Bahriun sebagai ketua BFO telah menunjuk Sultan Hamid dari Pontianak yang selama ini telah bertindak sebagai pejabat ketua. Karena Tuan Moh. Hanafiah telah menarik diri sebagai wakil ketua karena alasan-alasan pribadi, maka sebagai gantinya telah dipilih Oto Kusuma Subrata, menteri kehaikam Ad Interm dari negara pasundan.⁴⁴

Jadi sudah jelas isi rumusan tersebut bahwa Sultan Hamid sekarang bertindak sebagai ketua BFO. Maka segala aktivitasnya jelas berhubungan dengan maksud

⁴³ Ide Anak. *Op.Cit* ,hlm 171

⁴⁴ Leirissa, *op. cit.*, hlm 187.

dan tujuan BFO. Penulis melihat bahwasanya Sultan Hamid sebelum naik menjadi ketua BFO, beliau dulunya merupakan seorang wakil dari BFO dan juga sebagai Ajudan khusus Ratu Wilhelmina untuk kerajaan Belanda. Sebab statusnya sebagai wakil makhota Indonesia dan memiliki kedekatannya dengan Ratu Juliana, membuat sosok Sultan Hamid ini paling didengar oleh kerajaan Belanda dalam setiap perundingan dengan Indonesia.

3.3 Reaksi Republik Indonesia Terhadap Kehadiran BFO

Lahirnya BFO membawa sikap kewaspadaan bagi pihak Republik bahkan menaruh rasa tidak percaya dan lebih menganggap bahwa BFO merupakan bentukan negara Belanda. Masyarakat yang PRO terhadap RI berusaha mengetahui rencana Belanda, sehingga masyarakat lebih waspada dan mengerti terhadap rencana Belanda untuk menguasai Republik dibawah pengaruh negara Federal.

Kewaspadaan itu muncul saat konferensi di Kaliurang yang tidak membawa hasil dan menuduh bahwa BFO sebagai kaki tangan Belanda. Sehingga dalam mengambil keputusan RI selalu mengikuti dan menimbang usul dari pihak resmi seperti PBB melalui dewan keamanan. Golongan Republik sendiri meragukan usaha BFO untuk mempertahankan resolusinya dihadapan Belanda. Republik memandang bahwa munculnya BFO tidak mempunyai kekuatan yang cukup karena terdiri dari negara dan daerah bentukan Belanda, sehingga BFO dalam tindakanya akan menuruti semua keinginan Belanda.⁴⁵

Pandangan yang buruk dari kalangan Republik tidak menghalangi langkah BFO dalam memperjuangkan resolusi Bandung agar dapat diterima oleh kedua kubu yakni Belanda dan Republik. Karena usaha tersebut menimbulkan pandangan

⁴⁵ Sari Novita Rizqie, 'Dinamika Badan Permusyawaratan Federal (BFO) menuju Kedaulatan Indonesia', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 2. 3 (2014). hlm 39.

baru bagi kedua kubu. Kedua kubu tersebut memandang bahwa BFO sebagai kekuatan ketiga yang dapat menguntungkan salah satu pihak. Maka dari itu pihak Republik tidak mau tergesa-gesa dalam menilai BFO sebab didalam BFO sendiri masih ada orang yang Pro terhadap Republik. Mereka sedang menunggu sikap pemerintah RI dan menunggu tindakan BFO dalam perjuangan RI memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.

BFO membuktikan keberpihakannya dengan mengirim utusan ke Bangka untuk mendekati pemimpin RI dan menunjukkan hasil. BFO mengadakan penghubung dengan para pemimpin RI yang ditawan melalui komisi penghubung. Disini dapat dipahami bahwa BFO tidak Pro terhadap Belanda, melainkan sebaliknya. Pernyataan tersebut didukung dengan tegas oleh Sultan Hamid II bahwa BFO tidak bertanggung jawab atas agresi militer Belanda, BFO sama sekali tidak dalam rencana Belanda. Bahkan serangan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada BFO setelah perundingan di Kaliurang gagal pada bulan Oktober sampai November 1948 dan sidang di skors.⁴⁶

Sultan Hamid II dapat membuktikan bahwa BFO bukan kaki Belanda, walaupun beranggotakan negara dan daerah otonomi bentukan Belanda. Sultan Hamid II menyadari bahwa BFO dan RI merupakan bagian dari Indonesia, sehingga semua anggota baik BFO maupun RI menganggap bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia bukan milik seorang saja melainkan milik bersama.

Republik kembali menanyakan untuk siapa usaha BFO selama ini yang mengusakahn agar RI bersedia berunding dengan Belanda. Pertanyaan ini tidak di jawab karena Sultan Hamid II, Anak Agung dan juga para anggota yang lain sepakat

⁴⁶ Leirissa, *op.cit.*, hlm 174

bahwa prinsip yang dilakukannya untuk Indonesia seluruhnya. BFO juga berharap suatu saat nanti mereka dapat menyatukan pikiran federalis dengan pihak Republik. Sehingga kedua kubu saling berjuang bersama mengatas namakan Indonesia seluruhnya.

Analisis berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melihat bahwa Republik masih belum menerima kedudukan BFO. Dapat dipahami juga bahwa Republik memiliki sifat kewaspadaan namun kemungkinan pula Republik memandang bahwa pemimpin BFO Sultan Hamid memiliki pengaruh kendali Belanda. Namun Sultan Hamid meyakinkan bahwa apa yang terjadi pada Republik bukan atas perintah beliau, bahkan BFO saja tidak diberitahu soal penyerangan itu.

3.4 Konflik Internal BFO

Sejak dibentuknya BFO pada bulan Juli 1948. Dalam kubu BFO sendiri terbagi menjadi dualisme. satu pihak diisi dengan pihak Sultan Hamid II (Kalimantan Barat) dan Mr. T, Mansur (Sumatra Timur) sedangkan dipihak lain Anak Agung (Negara Indonesia Timur) dan R.T. Adil Puradiredja (Negara Pasundan). Pada dasarnya Sultan Hamid dan dr. T. Mansur bermain hati-hati dengan mengikuti rencana Belanda agar segeranya dibuat pemerintahan sementara sebagai jalan keluar diberikanya kedaulatan dari Belanda tanpa mengikut sertakan RI.

Pihak Anak Agung dan Adil Puradiredja tidak sepenuhnya mengikuti keinginan Belanda dan menginginkan agar segera di berikanya kedaulatan terhadap tatanan baru yang akan dibentuk berlandaskan federalisme seperti yang telah dirumuskan dalam Persetujuan Linggajati dan Perjanjian Renville namun ia menganggap perlu mengikut sertakan RI. Perbedaan pendapat itu menimbulkan krisis pertama dalam tubuh BFO yang mengancam eksistensinya.

Seperti telah diketahui, bahwa pertemuan Beel dengan kabinet Drees di Den Haag itu melahirkan sebuah gagasan untuk penyelenggaraan konperensi di Den Haag yang kemudian akan dikenal sebagai Konperensi Meja Bundar (KMB). Gagasan itu sesungguhnya merupakan paduan antara gagasan Beel dengan Anak Agung dan Pembicaraan di Bangka antara Anak Agung dengan Sukarno-Hatta dan teman-temannya terutama berkisar pada gagasan itu.

Dalam pembicaraan di Bangka itu Anak Agung berusaha meyakinkan para pemimpin RI itu, bahwa KMB tanpa Pemerintah Interim adalah jalan terbaik. Sebab itu sebaiknya RI, BFO, dan Belanda bersama-sama duduk untuk membicarakan pembentukan Negara Indonesia Serikat. Namun masalah yang belum bisa diselesaikan adalah permintaan para pemimpin RI agar sebelum ke Den Haag kekuasaan mereka dipulihkan kembali di Yogyakarta sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Namun justru pada saat inilah ketegangan antara kubu Anak Agung dan kelompok Sultan Hamid makin meningkat. Sikap Anak Agung/Djumhana yang memihak pada Resolusi PBB yang menghendaki agar Pemerintah RI dipulihkan kembali di Yogyakarta, pendapat tersebut tidak diterima oleh kelompok Sultan Hamid. Kelompok Sultan Hamid tetap memihak pada Beel yang menolak Resolusi PBB dan menghendaki penyelesaian menurut rencana Beel.

Dalam rapat BFO tanggal 3 Maret 1949 dimana Sultan Hamid II akan melaporkan hasil kunjungan delegasi BFO ke Bangka. Sebelum menghadiri rapat itu Anak Agung telah menyiapkan sebuah konsep resolusi yang akan disodorkan kepada para anggota BFO dalam rapat itu. Rapat berlangsung berlarut-larut tanpa dapat dicapai penyelesaian antara blok Sultan Hamid dan blok Anak Agung. Kedua

belah pihak mengajukan berbagai argumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian bahwa rapat tidak akan mungkin menghasilkan suatu keputusan. Sekitar pukul dini hari ketika sebagian besar anggota sudah mengantuk dan bosan, Tanpa meneliti naskah itu, para anggota sebagian memang tidak meragukan maksud baik Anak Agung, dengan spontan dan aklamasi memberi persetujuannya atas rancangan resolusi itu. Dengan demikian rancangan resolusi yang disusun Anak Agung itu menjadi syah sebagai Resolusi BFO.⁴⁷

Keesokan harinya ketika tidak menyadari makna dari resolusi Anak Agung itu, Sultan Hamid II dan Dr.T. Mansur mengunjungi Beel untuk menunjukkan resolusi itu. Setelah membacanya Beel mengatakan bahwa ia sangat kecewa pada Anak Agung dan ia merasa mendapat pukulan dari belakang. Beel mengira bahwa Anak Agung menyetujui kebijakannya dalam menolak Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 itu, padahal Resolusi BFO hasil inisiatif Anak Agung itu justru berisi pendapat yang sebaliknya. Beel mendesak agar Sultan Hamid II dan Dr. T. Mansur berusaha agar resolusi itu diralat.⁴⁸

Sultan Hamid II sebagai ketua BFO mengundang para anggota untuk berapat lagi untuk meminta mereka meralat resolusi tersebut. Ia mengatakan, bahwa resolusi itu sebenarnya belum sah karena harus ditandatangani oleh seluruh anggota. Lalu Dr. T. Mansur muncul dengan resolusi tandingan yang diupayakan untuk diterima oleh rapat. Tetapi ternyata terjadi perpecahan lagi antara pro dan kontra resolusi dari Anak Agung itu. Rapat lalu memutuskan untuk membicarakannya lagi dalam rapat berikutnya dan sebab itu rencana pengiriman delegasi BFO ke Bangka harus ditunda. Malam harinya Dr. T. Mansur bersama

⁴⁷ Ide Anak, *op.cit.*, hlm 252-253

⁴⁸ Leirissa, *op.cit.*, hlm 222.

Wali Negara Jawa Timur melaporkan jalannya rapat tersebut kepada Beel dan berjanji bahwa dalam rapat berikutnya resolusi itu akan ditarik.

Keesokan harinya BFO berapat lagi. Dr. T. Mansur menyampaikan keinginan Beel agar resolusi Anak Agung itu ditolak. Tetapi Anak Agung bersikeras untuk mempertahankannya. Karena kesepakatan tidak bisa dicapai, maka rapat lalu beralih membicarakan rencana kunjungan delegasi BFO ke Bangka.

Kunjungan itu dijadwalkan akan dilakukan tanggal 11 Maret 1949. Situasi rapat itu semakin panas sehingga beberapa anggota memperkirakan, bahwa pertemuan BFO dengan para pemimpin RI itu akan gagal. Anak Agung yang yakin bahwa para pemimpin RI di Bangka telah memahami maksud dan tujuannya sama sekali tidak berusaha untuk menenangkan rapat dengan cara mencari kompromi. Sebab itu delegasi BFO itu tidak jadi berangkat ke Bangka.⁴⁹

Sebelum rapat BFO tersebut, Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II betemu dengan Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI, untuk membicarakan gagasan-gagasannya yang disampaikan di Bangka. Selain itu Anak Agung juga membicarakan resolusi yang disodorkannya pada para anggota BFO. Berbeda dengan Beel, Cochran gembira mendengar isi resolusi yang diajukan dalam rapat BFO tanggal 3 Maret 1949 itu dan menyetujuinya sepenuhnya. Sultan Hamid yang sejak awal pertemuan itu diam saja, tiba-tiba berbicara. Tanpa memahami betul jalannya pembicaraan ketika itu, ia berkata pada Cochran, bahwa Beel justru menolak resolusi tersebut. Cochran lalu menjawab, kalau Beel mau berhenti silahkan saja, tetapi RI tetap akan didukungnya. Sejak itu kelompok Hamid II kehilangan semangat untuk tetap bersikeras mempertahankan pandangan Beel dan

⁴⁹ Ide Anak, *op.cit.*, hlm 253

menentang Anak Agung. Dalam keadaan seperti itu Beel berpikir-pikir apakah ada manfaatnya untuk bertumpu pada BFO. Apa lagi ketika ia mendengar bahwa dalam rapatnya BFO tidak berhasil menarik resolusi Anak Agung tersebut diatas.⁵⁰

Pertentangan pendapat antara Sultan Hamid dan Anak Agung tidak kunjung mereda. Sultan Hamid memegang pada pendapatnya bahwa Resolusi 3 Maret 1949 yang disodorkan oleh Anak Agung tidak sah dan bukan resolusi BFO. Sebaliknya Anak Agung bersikeras bahwa resolusi itu sah. Sementara itu muncul permasalahan lain. Mc Naughton, wakil Kanada dalam DK, mengajukan sebuah usul yang sangat mirip dengan usul yang pernah dilontarkan Hatta ketika ia menerima utusan BFO di Bangka tanggal 3 Maret 1949.

Dapat dipahami bahwa Sultan Hamid sebagai ketua BFO merasa khawatir apabila rencana dari Beel gagal, sebab apabila rencana Beel itu gagal maka kesempatan untuk menerima kedaulatan dari pemerintahan Belanda akan menjadi sulit. Pada kesempatan kali itu Mc Naughton mengusulkan agar DK memerintahkan UNCI untuk menyelenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil Belanda dan wakil-wakil RI untuk membicarakan masalah kembali ke Yogya yang menjadi penghalang bagi penyelenggaraan KMB. Sebelum DK menerima usul itu, wakil Belanda di PBB, van Royen, telah melaporkan perkembangan baru itu pada kabinet Belanda di Den Haag. Kabinet lalu menyurat pada Beel di Jakarta untuk memberi pertimbangan mengenai usul di DK itu. Sebelum Beel menjawab permintaan kabinet Belanda itu, ia terlebih dahulu meminta pendapat dari BFO. Sebab itu ia mengundang para ketua delegasi BFO untuk menemuinya di istana Rijswijk.

⁵⁰ Leirissa, *op.cit.*, hlm 208.

Dalam pertemuan Beel mengemukakan pendapat, bahwa sebenarnya perkembangan di Indonesia telah jauh lebih baik. Belanda memang menolak Resolusi DK tanggal 28 Januari 1949 itu, karena Resolusi itu hanya mengandung sebuah prosedur untuk pembentukan Negara Indonesia Serikat. Tetapi pemerintah Belanda justru mengajukan usul-usul tandingan yang jauh lebih baik yang mengandung cara-cara penyelesaian yang konkret. Salah satu upaya konkret pemerintah Belanda, katanya, adalah menyelenggarakan KMB.

Tetapi ia tidak lupa menambahkan bahwa mengenai soal para pemimpin RI, pemerintah Belanda tidak berubah pikiran, demikian juga mengenai ikut sertanya UNCI dalam KMB. Lalu Beel menyinggung perkembangan baru dalam Dewan Keamanan, bahwa kabinet Belanda minta padanya untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya mengenai masalah itu. Tetapi, katanya sebelum ia menjawab permintaan kabinet itu, ia hendak meminta pertimbangan BFO terlebih dahulu.

Ketua delegasi BFO Sultan Hamid. Ia menyatakan sangat gembira dengan gagasan penyelenggaraan KMB itu. Tetapi pada saat yang sama ia juga memandang bahwa ia mulai berubah dan bersedia menerima resolusi yang diprakarsai oleh Anak Agung pada tanggal 3 Maret 1949 tersebut. Setelah mengatakan, bahwa BFO menyambut baik upaya pemerintah Belanda untuk melangsungkan KMB, ia beralih pada pendirian BFO seperti yang tercantum dalam resolusi tanggal 3 Maret 1949 itu. Ia mengatakan.

"BFO telah mempertimbangkan hal itu dan berniat untuk mengumumkan pandangannya esok hari. BFO ingin memohon kepada Pemerintah Belanda agar mengubah lagi pendiriannya mengenai pemulihan para pemimpin Republik ke Yogya'. Selanjutnya BFO mau menerima bantuan UNCI pada Konperensi Meja Bundar. Kepada para pemimpin Republik BFO dalam hal ini ingin memohon agar ikut serta dalam Konperensi Meja Bundar. Dan agar

sekembalinya ke Yogya segera mengumumkan perintah 'cease fire' untuk seluruh Indonesia. Pendirian ini, demikian pembicara, kelihatannya berlawanan dengan pendirian pemerintah Belanda. Akan tetapi dalam satu dan lain hal kita memakai sebagai pangkal pikiran, bahwa Republik, dengan diizinkan syarat-syarat ini, akan bersedia untuk turut serta dalam Konperensi Meja Bundar. Jika tidak dengan Republik dan tidak dengan UNCI, maka akan sukarlah untuk mengadakan Konperensi Meja Bundar yang sempurna, sehingga Dewan Keamanan bercampur tangan juga."⁵¹

Beel lalu menjawab pernyataan dengan menyinggung masalah para pemimpin RI dan turut sertanya UNCI dalam KMB. Ia mengatakan, bahwa ia tidak bisa mempengaruhi pendirian BFO. tetapi sebaiknya BFO tidak mengambil keputusan yang terlalu cepat sebelum usul dalam Dewan Keamanan diketahui.

Keesokan harinya tanggal 12 Maret 1949 para ketua delegasi BFO bersidang lagi. Salah satunya membahas pertemuan dengan Beel sehari sebelumnya. Ketua BFO mengatakan, bahwa kemarin ia berbicara atas nama seluruh BFO. Namun karena kemarin tidak ada yang mengomentari keterangan dari Beel, maka kini ia ingin bertanya apakah sidang setuju dengan apa yang dikemukakannya itu. Secara serempak para hadirin menjawab setuju.

Kemudian terjadi perdebatan panjang antara Anak Agung dan Sultan Hamid. Pada dasarnya Anak Agung mendesak agar Sultan Hamid mengakui bahwa apa yang dikatakannya kepada Beel itu adalah inti dari Resolusi 3 Maret 1949 yang diprakarsainya. Sebaliknya Sultan Hamid mencoba berkilah bahwa hal itu tidak benar.

Mengatakan bahwa kemarin ia juga telah mengemukakan kepada Wakil Tinggi Mahkota, bahwa hari ini BFO akan menentukan pendiriannya. Sebab itu hari ini pula ia telah menyusun suatu konsep resolusi yang telah diedarkan pada para

⁵¹ Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 229

anggota. Tetapi kini ia berubah pikiran. Sebaiknya konsep resolusi itu disimpan dulu, jangan dibicarakan hari ini. Sebaiknya menunggu putusan dari DK di Lake Success mengenai usul Mc Naughton, baru BFO menentukan sikapnya. Dengan demikian BFO tidak akan mendahului pemerintah Belanda. Maka untuk memperlihatkan bahwa sebagai ketua ia masih tetap bisa menentukan arah perjalanan BFO Sultan Hamid II mengalihkan komentar Anak Agung itu dengan cara mengemukakan masalah lain.

Perdana Menteri Negara Pasundan, Djumhana Wiraatmaja, menjawab, bahwa sesungguhnya tidak perlu lagi mengeluarkan resolusi baru karena BFO telah menerima resolusi tanggal 3 Maret 1949 yang lalu. Kalau nanti ternyata DK menentukan jalan lain, maka BFO masih bisa mempertimbangkan kembali pendiriannya. Sebagai alasan mengapa ia mengajukan tuntutan agar BFO menunda mengambil keputusan untuk mendukung atau menolak keinginan Beel, Sultan Hamid mengatakan bahwa atas Resolusi 3 Maret 1949 itu delegasi Sumatra Timur (dr.T. Mansur) telah mengajukan keberatan-keberatan.

Alasan yang diajukan oleh pihak Sumatra Timur itu pada dasarnya menyangkut pengakuan atas Pemerintah RI dan pengembalian para pemimpin RI ke Yogya. Keberatan keberatan tertulis oleh Sultan Hamid dianggap sebagai lampiran-lampiran dari Resolusi 3 Maret 1949. Anak Agung berbicara bahwa lampiran tersebut belum diterima, bahwa yang diterima tersebut ialah Resolusi 3 Maret 1949 tersebut.

Anak Agung ingin memastikan apakah apa yang disampaikan Sultan Hamid kepada Beel merupakan benar-benar mengakui inti dari resolusi tersebut. Namun krisis ini dapat dilalui tetapi ketegangan antara kedua blok tersebut meruncing

kembali ketika Dewan Keamanan melaksanakan suatu *preliminary conference* di Jakarta untuk membicarakan pengembalian Sukarno Hatta ke Yogya yang menghasilkan Pernyataan-pernyataan van Royen-Rum Kubu Sultan Hamid dan dr. Mansur mendukung Beel yang meletakkan jabatan sebagai protes atas kesepakatan itu, sedangkan Anak Agung dan Djumhana (pengganti Puradiredja) justru mendukungnya.⁵²

Peristiwa ini menimbulkan krisis kedua dalam tubuh BFO. Namun krisis inipun dapat dilalui dengan Resolusi 3 Maret 1949 itu. Sultan Hamid II ngotot bahwa lampiran-lampiran itu harus dilihat sebagai bagian integral dari Resolusi 3 Maret 1949. Namun Anak Agung menolak pendapat itu dengan mengingatkan bahwa lampiran-lampiran itu belum dibicarakan dan belum diterima oleh sidang, sedangkan Resolusi 3 Maret 1949 sudah disahkan oleh rapat. Wali Negara Sumatra Timur, dr.T. Mansur, malah ikut mendukung Sultan Hamid II dengan mengatakan, kalau lampiran itu tidak diterima, maka ia akan menarik dukungan Sumatra Timur.

Kemudian timbul dialog yang panjang antara Sultan Hamid dan Anak Agung. Pada dasarnya Anak Agung menginginkan agar Sultan Hamid mengakui saja bahwa apa yang telah dikatakannya dalam pertemuan dengan Beel sehari sebelumnya itu adalah inti dari Resolusi 3 Maret 1949. Ketua BFO menekankan bahwa dalam pertemuan dengan Beel ia telah mengemukakan dua prinsip dari BFO, yaitu, bahwa (1) para pemimpin RI harus kembali ke Yogya, dan (2) bahwa UNCI harus ikut serta dalam KMB. Dialog panjang antara Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung bertujuan agar Sultan Hamid secara resmi mengakui bahwa apa

⁵² Leirissa, *op.cit.*, hlm 220.

yang dikatakannya kepada Beel sehari sebelumnya pada dasarnya adalah inti dari Resolusi 3 Maret 1949.

Namun Sultan Hamid II, seperti halnya dr.T. Mansur, nampaknya belum mau menerima pernyataan Anak Agung itu. Alasannya adalah kalau mereka menerima Resolusi itu, maka itu berarti bahwa BFO telah mengemukakan pendiriannya dan tidak perlu menunggu keputusan berikut dari Dewan Keamanan. Anak Agung bertanya pada Sultan Hamid apakah keterangan yang diberikannya kepada Beel kemarin itu sesungguhnya adalah inti dari Resolusi 3 Maret 1949. Sultan Hamid mencoba mengelak. Namun pada akhirnya Sultan Hamid terpaksa mengakui juga bahwa kedua prinsip yang diajukan dalam pertemuan dengan Beel kemarin itu pada dasarnya adalah inti dari Resolusi 3 Maret 1949.

Akibat kekacauan mengenai diterima atau tidak diterimanya Resolusi 3 Maret 1949 itu juga sudah mencuat dalam pers maka rapat memutuskan agar Sultan Hamid sebagai ketua BFO mengeluarkan suatu pernyataan yang menandakan bahwa Resolusi 3 Maret 1949 adalah sikap resmi dari BFO.

Secara lengkap penjelasan Sultan Hamid kepada pers yang disampaikan pada tanggal 24 Maret 1949 adalah sebuah pernyataan yang telah disusun sehari sebelumnya. Dalam keterangan itu Sultan Hamid mengatakan, bahwa ia sangat menyesal terjadinya kekacauan dalam pers mengenai Resolusi 3 Maret 1949. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa mengeluarkan pernyataan itu karena

“mereka yang memberi penerangan termaksud tadi berkata lebih dari pada apa yang mereka dapat pertanggung-jawabkan." Tentang Resolusi 3 Maret itu ia mengatakan, "Pada tanggal 3 Maret oleh BFO telah diterima baik suatu resolusi yang amat rahasia, yang isinya yang diputar balik dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah itu diketahui umum....."⁵³

⁵³ Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 236

Pada waktu pembicaraan antara para pemimpin delegasi beserta pimpinan BFO dengan Wakil Tinggi Mahkota memang oleh saya diberitahukan kepadanya pokok-pokok utama dari resolusi. Azas utama yang bermaksud diatas oleh BFO diterima baik dengan suara bulat, ialah (1) BFO setuju mengembalikan pemerintah Republik ke Yogyakarta dan daerah sekitarnya (2) BFO menerima baik bantuan UNCI pada Konperensi Meja Bundar.

Resolusi itu diterima baik karena para pemimpin Republik dalam perundingan dengan Panitia Penghubung BFO di Bangka telah memberi kepastian dan hal ini ditetapkan pula dalam resolusi bahwa Pemerintah Republik (1) Akan ikut serta dan membantu Konperensi Meja Bundar (2) Setelah kembali di Yogyakarta akan memberikan perintah untuk menghentikan semua permusuhan.⁵⁴ Para pemimpin Republik menjanjikan hal ini asal saja syarat-syarat yang ditetapkan oleh mereka, yaitu Pengembalian ke Yogyakarta Pembicaraan dalam Konperensi Meja Bundar tak akan mengurangi kedudukan UNCI sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dipenuhi.

"Saya harap bahwa pengumuman ringkasan dari keadaan sesungguhnya itu akan menjernihkan kekacauan di sekitar resolusi ini yang timbul karena ucapan-ucapan yang belum pada waktunya dan yang sebagian tidak benar. Akhirnya bersama ini mudah-mudahan perbincangan akan dihentikan dengan pasti".⁵⁵

Sementara itu pada tanggal 23 Maret 1949 Dewan Keamanan menerima usul Kanada agar UNCI menyelenggarakan suatu "preliminary conference" antara Belanda dan Indonesia untuk membicarakan pengembalian para pemimpin RI ke

⁵⁴ Ide Anak. *Op. Cit* , hlm 260.

⁵⁵ Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 237

Yogyakarta. Namun Beel ternyata tidak bisa menerima keputusan itu. Pada tanggal 27 Maret 1949, ia mengundang para ketua delegasi ke istana untuk menyampaikan pandangannya mengenai Perkembangan baru itu.

Seperti halnya dalam rapat 11 Maret 1949 yang lalu dengan para ketua delegasi BFO, Beel sekali lagi menandakan, bahwa ia tidak bisa menerima Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan juga usulan Dewan tanggal 23 Maret 1949. Ia berpendapat bahwa apa yang sedang diusahakannya agar penyerahan kedaulatan dilaksanakan secepat mungkin adalah cara yang paling baik. Lagi pula keadaan politik, keamanan dan ekonomi di Indonesia kini telah jauh lebih baik.

Beel menambahkan bahwa ia harus melapor ke Den Haag mengenai pendapatnya, karena pada tanggal 28 Maret 1949 kabinet akan mengambil keputusan mengenai usulan baru dari Dewan Keamanan itu. Tetapi sebelum menyampaikan pendapatnya ke Den Haag, katanya, ia ingin mendengar pendapat para ketua delegasi BFO.

Kemudian dengan sangat hati-hati Sultan Hamid II menjawab bahwa sesungguhnya pendirian BFO telah disampaikannya dalam pertemuan di Istana dengan Beel pada tanggal 11 Maret 1949. Selain itu pada tanggal 24 Maret 1949 ia juga telah menyampaikan kepada pers bahwa BFO secara bulat mendukung Resolusi 3 Maret 1949. Ia menambahkan bahwa karena BFO belum sempat rapat, maka tidak ada pendirian lain yang dapat dikemukakan kecuali yang telah diketahui oleh umum itu. Namun ia mengatakan, bahwa ia akan menyerahkan masalah ini kepada para delegasi BFO agar masing-masing mengemukakan pendapatnya sendiri.

Setelah dipersilahkan, ternyata semua ketua delegasi BFO yang berbicara menyetujui pendapat ketuanya. Anak Agung malah mengatakan, bahwa pendirian Indonesia Timur telah dikemukakan juga dalam pertemuan tanggal 11 Maret 1949 yang lalu seperti yang juga telah dikemukakan pula oleh Ketua BFO dalam siaran persnya. Hanya ia menambahkan bahwa sebaiknya sebelum KMB baik anggota-anggota BFO maupun yang bukan mengadakan perundingan persiapan. Inilah pertama kalinya Anak Agung mengemukakan gagasannya di depan Wakil Tinggi Mahkota mengenai apa yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Inter-Indonesia.

Tenyata kemudian, bertentangan dengan keinginan Beel, gagasan mengenai *preliminary conference* itu ternyata diterima oleh kabinet Drees. Menteri Luar Negeri Stikker lalu memerintahkan agar van Royen menyampaikan dalam Dewan Keamanan, bahwa (1) Belanda bersedia menyelenggarakan KMB, dan (2) Belanda bersedia hadir dalam *preliminary conference*. Kemudian kabinet melangkahi Beel dan memutuskan untuk mengangkat van Royen menjadi ketua delegasi Belanda dalam perundingan yang akan dilaksanakan di Jakarta itu. Ketika di Jakarta diadakan persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan *preliminary conference* tersebut Sultan Hamid II menggunakan wewenangnya sebagai ketua BFO untuk menghubungi Beel untuk mengatakan, bahwa BFO ingin turut serta dalam perundingan-perundingan itu.

Ketika Beel meneruskan permintaan Sultan Hamid II itu ke Den Haag, ternyata pemerintah Belanda memutuskan untuk tidak mengizinkan BFO ikut dalam perundingan pendahuluan itu. Kabinet Belanda berpendapat, bahwa sebaiknya BFO tidak ikut dalam perundingan tersebut agar masalah kembali ke

Yogya tidak dicampur adukan dengan masalah-masalah yang harus dibicarakan dalam KMB. Selain itu BFO tidak mempunyai kepentingan langsung dalam masalah kembali ke Yogya, dan lebih mendasar lagi, BFO bukan sebuah negara yang berdaulat.

Organisasi BFO perlu dibenahi agar bisa mengantisipasi undangan-undangan yang datangnya dari UNCI maupun Belanda untuk ikut aktif menyelesaikan berbagai masalah sebelum penyerahan kedaulatan. Sebab itu dalam rapat BFO tanggal 14 April 1949, Anak Agung mengajukan sebuah nota yang isinya adalah rencana reorganisasi BFO. Nota itu kemudian dibahas dalam rapat tanggal 17 April 1949 dan disetujui oleh para anggota. Pada pokoknya reorganisasi itu berbunyi BFO sebagai organisasi mempunyai hak untuk tetap berdiri, BFO adalah partai yang mandiri dalam perundingan-perundingan mengenai masalah Indonesia, Reorganisasi BFO mencakup Landasan sesuai persetujuan Linggajati bahwa Negara Indonesia Serikat mencakup seluruh Indonesia, Dalam NIS semua negara bagian sederajat dan, mempunyai hak yang sama, Sebelum terbentuknya NIS kedaulatan Belanda diakui, NIS secara sukarela akan membentuk Uni, Pengambilan keputusan dalam BFO didasarkan pada suara mayoritas (3/4), Apabila ada anggota yang tidak setuju dengan keputusan BFO, anggota itu dapat mengajukan keberatan, Untuk mewakili BFO dibentuk sebuah panitia yang terdiri dari ketua, 2 anggota dari Jawa dan Madura, 1 anggota dari NIT, 1 anggota dari Kalimantan, 2 anggota dari Sumatra.

Sementara BFO terus mengadakan rapat-rapat untuk membenahi dirinya *preliminary conference* juga disiapkan. Sebagai penyelenggara pertemuan

pendahuluan itu jauh-jauh hari UNCI telah siap dengan syarat-syarat yang harus diterima RI apabila mereka ingin kembali ke Yogya.

Dua anggota UNCI, Cochran (USA) dan Herremans (Belgia) lalu berangkat pada tanggal 29 Maret 1949 ke Bangka untuk mengusahakan agar para pemimpin RI bersedia hadir dalam *preliminary conference* tersebut. Para pemimpin RI dengan sangat gembira menyambut permintaan UNCI itu. Ketika itu pun diputuskan agar Moh, Rum menjadi ketua delegasi RI. Maka dalam awal April wakil-wakil RI dari Bangka tiba di Jakarta, yaitu Mr. Moh, Rum, dan Mr. Ali Sastroamidjojo. Wakil-wakil RI yang berdiam di Jakarta juga hadir, yaitu Dr. J. Leimena, Moh, Natsir, dan dr. Sudjono. Kemudian dari Yogyakarta datang pula Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Laoh, Ir. Djuanda, Mr. Latuharhary.

Rapat pendahuluan itu dibuka tanggal 14 April 1949 dan berlangsung hingga tanggal 7 Mei 1949. Rangkaian pertemuan dilangsungkan di Hotel des Indes dibawah pimpinan UNCI. Dalam salah satu kesempatan Cochran berhasil mendatangkan Hatta dari Bangka ke konsulat Amerika Serikat di Jakarta untuk meminta pendapatnya soal kembali ke Yogya itu. Maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua belah pihak mencapai persetujuan dan dikeluarkanlah dua statement, masing-masing ditandatangani oleh Mr. Moh, Rum dan Dr. H. van Royen. Statement Moh, Rum terdiri atas tiga pasal, yaitu: RI akan mengumumkan cease-fire, RI akan memelihara ketertiban, R.I. akan ikut KMB. Sedangkan Statement van Royen terdiri atas tujuh pasal, yaitu: Belanda akan mengembalikan para pemimpin RI ke Yogya, Wilayah RI meliputi keresidenan Yogyakarta saja, Belanda bersedia menghentikan operasi militer, Belanda tidak akan membentuk dan mengakui pembentukan negara bagian baru wilayah RI setelah tanggal 19 Desember 1948,

Belanda setuju RI menjadi bagian dari RIS, Belanda akan segera menyelenggarakan KMB, Polisi RI diizinkan bekerja diluar wilayah karesidenan Yogyakarta memulihkan kekuasaan RI di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Keesokan harinya van Royen bertemu dengan Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Pada kesempatan itu duta besar Belanda itu memberitahukan secara resmi pada BFO, bahwa kesepakatan telah tercapai antara Belanda dan RI mengenai masalah kembali ke Yogya. Tapi Beel keberatannya karena Pernyataan Rum-Royen sebab bertentangan dengan salah Rencana Beel yang telah diperjuangkan sejak bulan Januari 1949, yaitu menolak setiap usaha kearah kembali ke Yogya. Sebab itu pada tanggal 11 April 1949, ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai *Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon* kepada Ratu Juliana. Beberapa hari kemudian, Ratu pun menyetujui permohonan itu. Rupanya pernyataan Rum-Royen baginya sama saja dengan pernyataan kekalahan Belanda dalam perang melawan RI. Hal itu terlampau berat baginya untuk diterima.

Ternyata Resolusi 3 Maret 1949 itu berhasil membuat strategi yang memungkinkan BFO tanpa adanya perpecahan dalam tubuhnya untuk menerima usulan agar pimpinan RI dibebaskan Belanda, mengembalikan kekuasaan RI di Yogya, dan UNCI diikut sertakan pada Konperensi Meja Bundar. Terobosan ini bukan saja menghalangi rencana Beel untuk membentuk Pemerintahan Interim tanpa RI yang cenderung akan mengakibatkan perpecahan pada bangsa Indonesia, tetapi membuka jalan terselenggaranya Konperensi Meja Bundar dan pembentukan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.

Bab ini menunjukkan bahwa peranan Sultan Hamid jika dikaitkan dengan teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini ada kesamaan dengan penjelasan dari kedua ahli teori peranan yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan ataupun status jika dikorelasikan dengan pembahasan Sultan Hamid dapat kita pahami bahwa ketika Anak Agung mengadakan suatu pertemuan dengan daerah federal lainnya Sultan Hamid menjadi orang yang vokal membela kepentingan daerah yang diwakilinya. Ia menganggap apa yang dilakukan Anak Agung itu berbahaya dan dapat mengacaukan pemberian kedaulatan. Namun Anak Agung meyakinkan bahwa pemberian kedaulatan akan berhasil apabila RI diikutsertakan.

Pada bab ini juga penulis memandang apa yang dilakukan Sultan Hamid ternyata direspon juga oleh T. Mansur (Sumatra Timur) membenarkan bahwa untuk mencapai kedaulatan tanpa RI ataupun tidak harus segera dilakukan. Disini pihak dari kubu Anak Agung tidak goyah dengan pendapat yang diberikan dan tetap pada pendiriannya.

Bab ini juga terjadi konflik internal antara Sultan Hamid dan Anak Agung, penulis melihat bahwasanya konflik seperti ini sering terjadi dalam internal BFO, di satu sisi Anak Agung mengakui apabila seperti ini terus maka akan mudah dimanfaatkan oleh Beel (menteri Belanda).

Sultan Hamid juga menyadari sebagai pemimpin ia masih mampu untuk bisa mengendalikan BFO agar tidak terpecah belah. Pada bab ini juga penulis memandang akibat persetujuan ini muncul kesepahaman antara Anak Agung dan Sultan Hamid terlihat ketika Sultan Hamid menyatakan sikap kepada Beel

mengenai rencana akan dipercepatnya penyerahan kedaulatan. Disini terlihat juga peran dari Sultan Hamid dengan mengatakan bahwa untuk mempercepat penyerahan itu Sultan Hamid memegang Resolusi 3 maret 1949 yang pada awalnya Sultan Hamid tidak bersedia mengakui, namun pada kesempatan ini beliau pakai untuk menyatakan sikap kepada Beel bahwa pemerintahan RI harus segera dikembalikan ke Yogyakarta. Sultan Hamid berpendangan bahwa RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia.

Mendengar respon seperti itu Anak Agung lalu menyarankan agar secepatnya dilakukan jajak pendapat dengan RI mengenai kabar penyerahan kedaulatan yang akan dipercepat. Pada bab ini juga menjelaskan bahwa RI pada awalnya menolak namun melihat itikad baik dari BFO maka RI menerima permintaan itu dan bersedia ikut bergabung untuk berunding dalam Konferensi Meja Bundar.